

Peran Deninteldam XII/Tanjungpura Melalui Fungsi Penyelidikan Dalam Rangka Deteksi Dini Guna Pencegahan Pelanggaran Lintas Batas Wilayah Indonesia - Malaysia

Allaen Rahardian¹ Yulianto Hadi² Sungkunen Munthe³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: vallaent@gmail.com¹ yulianto.hadi@yahoo.com² skunen.ginting@gmail.com³

Abstrak

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan kawasan strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan infiltrasi lintas batas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi faktual (*das sein*) dalam pelaksanaan fungsi intelijen di perbatasan, khususnya terkait efektivitas deteksi dini oleh Deninteldam XII/Tanjungpura. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam rangka deteksi dini, mengkaji kolaborasi antarinstansi dalam pencegahan pelanggaran lintas batas, serta merumuskan strategi penyelidikan yang efektif dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penyelidikan Deninteldam telah diterapkan secara sistematis melalui siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Kolaborasi Deninteldam dengan Satgas Pamtas, Polda Kalbar, Imigrasi, dan Bea Cukai telah meningkatkan efektivitas deteksi dini di lapangan. Strategi penyelidikan yang diterapkan berorientasi pada intelijen preventif berbasis integrasi sumber daya manusia, teknologi, dan jejaring sosial. Kesimpulannya, peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan terbukti signifikan dalam memperkuat sistem pertahanan negara dan menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kata Kunci: Deninteldam XII/Tanjungpura, Fungsi Penyelidikan, Deteksi Dini, Perbatasan Indonesia-Malaysia, Intelijen Militer

Abstract

*The border area between Kalimantan and Malaysia is a strategic region with a high level of vulnerability to both traditional and non-traditional threats, including smuggling, human trafficking, and cross-border infiltration. This study was motivated by the gap between the ideal condition (*das sollen*) and the actual condition (*das sein*) in the implementation of intelligence functions at the border, particularly concerning the effectiveness of early detection by Deninteldam XII/Tanjungpura. The purpose of this research is to analyze the role of Deninteldam XII/Tanjungpura through its investigative function in early detection, to examine inter-agency collaboration in preventing border violations, and to formulate an effective intelligence strategy to support the main duties of the Indonesian Army (TNI AD). This study employs a qualitative method with a case study approach, using in-depth interviews, observation, and documentation analysis, supported by the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that Deninteldam's investigative function is systematically implemented through a complete intelligence cycle involving planning, execution, and evaluation, despite challenges in coordination and limited resources. Collaboration between Deninteldam, the Border Task Force (Satgas Pamtas), West Kalimantan Police, Immigration, and Customs has significantly improved early detection capabilities. The applied investigative strategy emphasizes preventive intelligence through the integration of human resources, technology, and social networks. In conclusion, the strategy Deninteldam XII/Tanjungpura through its investigative function plays a crucial role in strengthening national defense and safeguarding Indonesia's sovereignty in the Indonesia-Malaysia border region.*

Keywords: Deninteldam XII/Tanjungpura, Investigative Function, Early Detection, Indonesia-Malaysia Border, Military Intelligence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan dalam perspektif hubungan internasional dan keamanan nasional merupakan ruang strategis yang mencerminkan kedaulatan negara sekaligus menjadi titik rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Indonesia sebagai negara yang perbatasan wilayah darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan. Di antara ketiga wilayah tersebut, perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi karena karakteristik geografisnya yang berupa hutan lebat, perbukitan, sungai, serta banyaknya jalur tidak resmi (jalan tikus) yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Ancaman yang muncul tidak hanya bersifat konvensional, seperti pelanggaran batas wilayah, tetapi juga non-konvensional, seperti penyelundupan, perdagangan orang, peredaran narkotika, illegal logging, dan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tanjungpura memiliki lima kabupaten yang mempunyai perbatasan secara langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, yaitu Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sintang, Sambas, dan Kapuas Hulu. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah tersebut menjadi pintu resmi lalu lintas orang dan barang, namun di sisi lain tetap menyisakan potensi kerawanan akibat aktivitas lintas batas ilegal di luar jalur resmi. Kondisi ini menuntut kehadiran negara secara nyata melalui penguatan sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika ancaman.

Dalam kerangka pertahanan negara, TNI Angkatan Darat memiliki tugas pokok menjaga keamanan wilayah perbatasan darat sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Di lingkungan Kodam XII/Tanjungpura, Deninteldam XII/Tanjungpura berperan sebagai unsur intelijen yang melaksanakan fungsi penyelidikan, pengumpulan informasi, dan analisis potensi ancaman guna mendukung pengambilan keputusan komando. Fungsi intelijen tersebut menjadi elemen penting dalam sistem deteksi dini (early warning system) untuk mencegah terjadinya pelanggaran lintas batas wilayah Indonesia–Malaysia. Namun demikian, studi pendahuluan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal pengamanan perbatasan dan realitas di lapangan, khususnya terkait koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta optimalisasi fungsi penyelidikan dalam mendukung pencegahan ancaman. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran intelijen dan Satgas Pamtas dalam pengamanan perbatasan, termasuk penggunaan teknologi pendukung pengawasan dan pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP). Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam konteks deteksi dini dan pencegahan pelanggaran lintas batas masih terbatas. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam rangka deteksi dini guna pencegahan pelanggaran lintas batas wilayah Indonesia–Malaysia, serta mengkaji pola kolaborasi dengan instansi terkait di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data terdiri dari: wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah; Tinjauan Pustaka, yang menjelaskan teori-teori relevan: Teori Keamanan Nasional (*National Security Theory*), Konsep Intelijen dan Siklus Intelijen (*Intelligence Theory and Intelligence Cycle*), Teori Kolaborasi

(*Collaboration Theory*), Teori Deteksi Dini (*Early Warning Theory*), dan Teori Strategi Militer. Metode Penelitian, menguraikan pendekatan dan teknik pengumpulan data; Hasil dan Pembahasan, yang menjelaskan hasil temuan penelitian serta analisisnya. Berikutnya, Kesimpulan, yang meringkas hasil penelitian dan saran; serta Ucapan Terima Kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Teori Keamanan Nasional (*National Security Theory*)

Teori Keamanan Nasional bukan merupakan satu teori tunggal, melainkan bidang kajian interdisipliner yang menjelaskan bagaimana negara melindungi nilai inti, kedaulatan, dan kelangsungan hidupnya dari ancaman militer maupun nonmiliter. Berakar pada realisme klasik yang memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis, keamanan nasional dipahami sebagai konstruksi dinamis yang terus berkembang. Ćurčić (2021) menegaskan bahwa “*national security is a dynamic construct involving political, economic, social, and military dimensions that evolve in accordance with contemporary challenges.*” Dalam konteks kontemporer, spektrum ancaman meluas ke ranah siber, biosekuriti, disinformasi, dan ketergantungan ekonomi, sehingga memperluas cakupan keamanan melampaui konflik konvensional (Albert, Baez, & Rutland, 2021). Perkembangan mutakhir menekankan pendekatan holistik yang mengintegrasikan keamanan negara (*state security*) dan keamanan manusia (*human security*), dengan kepentingan nasional dan keamanan sebagai pilar kebijakan luar negeri dan pertahanan (Trifunović & Ćurčić, 2021). Di Indonesia, Lemhannas mendefinisikan keamanan nasional sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi segala ancaman terhadap integritas dan kelangsungan hidup negara (Lemhannas RI, 2023). Sejalan dengan itu, Kementerian Pertahanan menekankan bahwa keamanan nasional adalah kondisi yang dibangun secara terpadu melalui sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002, dengan TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Dengan demikian, teori keamanan nasional modern menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen kekuatan nasional guna membangun resiliensi dan adaptabilitas negara di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks.

Konsep Intelijen dan Siklus Intelijen (*Intelligence Theory and Intelligence Cycle*)

Konsep intelijen merujuk pada fungsi negara yang bertujuan menyediakan peringatan dini dan dukungan analitis bagi pengambil kebijakan dalam menjaga keamanan nasional. Secara etimologis berasal dari *intelligere* (Latin), intelijen dipahami sebagai kecerdasan yang diinstitutionalisasi dalam bentuk sistem keamanan negara (Manullang, 2013). Intelijen tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai instrumen politik dan keamanan yang dibentuk oleh persepsi ancaman dan prioritas strategis negara (Conboy, 2015). Haripin (2022) menegaskan bahwa intelijen memiliki tiga dimensi utama, yakni sebagai pengetahuan (produk informasi yang telah dianalisis), sebagai organisasi (lembaga pelaksana fungsi intelijen), dan sebagai kegiatan (serangkaian tindakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan). Dalam konteks Indonesia, peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa intelijen negara melakukan “deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.” Adapun Siklus Intelijen (*Intelligence Cycle*) merupakan kerangka kerja sistematis yang mengatur proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian informasi kepada pembuat kebijakan (Sarjito, 2024). Model ini memastikan bahwa informasi lapangan diolah secara terstruktur agar

akurat, relevan, dan tepat waktu dalam mendukung keputusan strategis. Dalam doktrin militer, siklus tersebut diwujudkan melalui tahapan persiapan, briefing, pelaksanaan, dan debriefing operasi intelijen (Perkasad, 2004), yang memungkinkan evaluasi dan pengendalian berkelanjutan. Dengan demikian, teori intelijen dan siklus intelijen menjadi fondasi operasional sistem keamanan nasional, karena menyediakan mekanisme deteksi dini dan manajemen risiko strategis yang adaptif terhadap dinamika ancaman konvensional maupun nonkonvensional.

Teori Kolaborasi (*Collaboration Theory*)

Teori Sistem Informasi Geografis (SIG) berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi guna mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data geografis. SIG memungkinkan penggunaannya untuk memahami pola, hubungan, dan tren geografis melalui analisis spasial dan visualisasi data berbasis lokasi (Longley et al., 2010). Menurut Heywood et al. (2011), SIG memiliki berbagai aplikasi yang luas dalam aspek, antarlain: perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, pra- bencana, dan analisis lingkungan (Ian Heywood et al., 2011). Dengan mengintegrasikan data spasial dan non-spasial, SIG memungkinkan organisasi atau individu untuk menentukan keputusan yang lebih baik dan berpedoman pada bukti geografis yang akurat. Penerapan SIG yang efektif membutuhkan keahlian dalam teknologi serta pemahaman mendalam mengenai konteks geografis yang dianalisis. Salah satu platform SIG yang banyak digunakan adalah Google Earth, yang menyediakan data geografis berbasis citra satelit dengan berbagai fitur untuk analisis spasial. Google Earth memungkinkan penggunaannya untuk mengakses data lokasi, peta, dan visualisasi 3D yang dapat digunakan dalam analisis lingkungan, pemetaan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam penelitian, Google Earth sering digunakan sebagai alat bantu untuk memantau perubahan penggunaan lahan, analisis topografi, dan perencanaan wilayah. Menurut Kraak dan Ormeling (2020), Google Earth menawarkan aksesibilitas yang tinggi karena gratis dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk peneliti, pelajar, dan profesional (Kraak & Ormeling, 2020). Google Earth tidak hanya menyediakan visualisasi data geografis yang mudah dipahami, tetapi juga mendukung integrasi dengan data eksternal untuk analisis yang lebih komprehensif, menjadikannya alat yang sangat bermanfaat dalam pengembangan SIG.

Konsep Deteksi Dini (*Early Warning Theory*)

Teori Deteksi Dini (*Early Warning Theory*) dalam konteks intelijen menekankan pentingnya identifikasi awal terhadap potensi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis terbuka. Intelijen dipahami sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional yang berfungsi memberikan peringatan dini dan mengelola risiko strategis melalui informasi yang akurat dan tepat waktu (Haripin, 2022). Secara normatif, peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebutkan bahwa intelijen negara memiliki peran melakukan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah dan menanggulangi ancaman. Deteksi dini sendiri merupakan upaya sistematis untuk menemukan indikasi awal dari peristiwa atau situasi yang berpotensi menjadi ancaman, sehingga aparat dapat menyiapkan langkah preventif sebelum gangguan benar-benar terjadi (Yudhana, 2009). Dengan demikian, konsep ini berorientasi pada *foreknowledge* atau kewaspadaan dini guna mendukung stabilitas nasional (Sumarjiyo, 2018). Dalam praktiknya, sistem peringatan dini mencakup tahapan pengumpulan informasi, analisis dan evaluasi, serta diseminasi kepada pengambil keputusan (Wahyurudhanto, 2018). Fungsi ini meliputi identifikasi ancaman, pencegahan pendadakan, pemberian peringatan dini, dukungan pengambilan keputusan, hingga manajemen krisis dan kontra-intelijen (Sumarjiyo, 2018). Bagus et al. (2019) menegaskan bahwa hakikat intelijen sebagai fungsi terpusat pada *early warning system*, yakni

mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Dalam konteks pertahanan matra darat, Intelijen TNI AD melaksanakan deteksi dini melalui kegiatan penyelidikan dan pengumpulan berbagai sumber intelijen guna mengantisipasi ancaman konvensional maupun non-konvensional (Seskoad, 2022). Oleh karena itu, teori deteksi dini menjadi fondasi konseptual dalam membangun sistem keamanan yang adaptif, preventif, dan responsif terhadap dinamika ancaman.

Teori Strategi Militer

Teori Strategi Militer berakar dari konsep klasik Yunani *strategos* yang berarti “seni seorang jenderal”, yaitu kemampuan mengerahkan kekuatan untuk memenangkan perang. Clausewitz dalam *On War* menegaskan bahwa strategi merupakan penggunaan pertempuran untuk meraih tujuan perang yang ditetapkan oleh kebijakan politik (Clausewitz, 1976/1984). Pandangan ini diperkuat oleh Liddell Hart (1929) yang mendefinisikan strategi sebagai “the art of employing military force to achieve the ends set by political policy.” Dalam perkembangan modern, strategi tidak lagi terbatas pada perang konvensional, melainkan mencakup pembentukan lingkungan keamanan secara lebih luas. Gray (2015) menyatakan bahwa “strategy is about shaping the future by influencing the behavior of others through the intelligent use of military power,” sehingga militer berperan dalam deterrence, stabilisasi, dan pencegahan eskalasi konflik. Secara konseptual, Lykke (1989) merumuskan strategi sebagai keseimbangan antara *ends* (tujuan), *ways* (cara), dan *means* (sarana), yang harus terintegrasi di semua tingkatan strategis. Tujuan militer berkaitan dengan misi nasional; cara merujuk pada konsep operasional seperti pertahanan berlapis atau proyeksi kekuatan; dan sarana mencakup sumber daya, personel, serta teknologi (Thomas, 2025). Dalam konteks keamanan kontemporer, militer juga menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menghadapi ancaman non-tradisional, memanfaatkan struktur komando dan mobilisasi cepat sebagai keunggulan strategis (McEntire, 2021). Sejalan dengan itu, strategi dipahami sebagai pendekatan terpadu yang mencakup perencanaan, pola tindakan, dan perspektif jangka panjang dalam mengelola sumber daya dan lingkungan operasi (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2005). Dengan demikian, strategi militer modern bukan hanya instrumen respons terhadap ancaman, tetapi juga alat proaktif untuk membentuk stabilitas dan kepentingan nasional.

Teori Peran

Teori Peran (*role theory*) merupakan kerangka konseptual yang berkembang dari sosiologi dan psikologi sosial untuk menjelaskan bagaimana perilaku individu dibentuk oleh posisi sosial yang disandangnya (Sarlito, 2013). Biddle dan Thomas mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan normatif yang mengarahkan perilaku seseorang sesuai dengan kedudukan sosialnya dalam suatu sistem interaksi. Peran tidak berdiri secara individual, melainkan lahir dari relasi sosial yang melibatkan aktor, pola perilaku, posisi sosial, serta hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial (Biddle & Thomas, 1966). Dengan demikian, peran berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat atau organisasi. Secara konseptual, peran mencakup dimensi normatif, aktual, dan struktural. Peran berkaitan dengan norma yang melekat pada suatu posisi, terefleksi dalam tindakan nyata individu, serta berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Soekanto (2012) mengklasifikasikan peran ke dalam tiga bentuk, yaitu peran aktif (pelaksanaan langsung sesuai kedudukan), peran partisipatif (kontribusi mendukung tujuan bersama), dan peran pasif (memberi ruang bagi fungsi lain agar berjalan optimal). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa

peran bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga efektivitas suatu organisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara ekspektasi peran dan pelaksanaannya dalam praktik sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis serta desain penelitian “studi kasus”. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam rangka deteksi dini guna pencegahan pelanggaran lintas batas Indonesia–Malaysia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena secara komprehensif dalam konteks nyata wilayah perbatasan, termasuk dinamika organisasi, pola kolaborasi antarlembaga, serta tantangan geografis dan geopolitik yang memengaruhi pelaksanaan tugas intelijen. Desain studi kasus difokuskan pada satu unit analisis, yaitu Deninteldam XII/Tanjungpura, guna menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana peran, kolaborasi, dan strategi deteksi dini dijalankan dalam praktik operasional. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam (semi-terstruktur), dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci yang dipilih secara purposive, antara lain pejabat dan personel Deninteldam XII/Tanjungpura, unsur Satgas Pamtas RI–Malaysia, serta perwakilan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Teknik snowball sampling digunakan untuk memperluas sumber informasi berdasarkan rekomendasi informan awal. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi, laporan internal, regulasi, serta literatur yang relevan. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Markas Deninteldam XII/Tanjungpura Pontianak dan beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dalam rentang waktu Juli 2025 hingga Februari 2026.

Pengolahan dan analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang terkumpul dikategorikan ke dalam tema utama: (1) peran penyelidikan dalam deteksi dini, (2) pola kolaborasi lintas instansi, dan (3) strategi pencegahan pelanggaran lintas batas. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi analitis dan pemetaan hubungan antarkategori untuk mengidentifikasi pola dan dinamika operasional. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap awal penelitian hingga penyusunan laporan akhir. Untuk menjamin kredibilitas temuan, diterapkan triangulasi sumber dan waktu, serta pencatatan sistematis guna menjaga validitas, reliabilitas, dan objektivitas penelitian. Melalui metode ini, harapannya didapatkan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas peran Deninteldam XII/Tanjungpura dalam mendukung deteksi dini dan pencegahan pelanggaran lintas batas Indonesia–Malaysia, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan fungsi intelijen teritorial di wilayah perbatasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam rangka deteksi dini guna pencegahan pelanggaran lintas batas wilayah Indonesia-Malaysia

Peran Detasemen Intelijen Kodam XII/Tanjungpura (Deninteldam XII/Tpr) dalam melaksanakan fungsi penyelidikan pada dasarnya merupakan implementasi nyata dari Konsep Intelijen dan Siklus Intelijen (*Intelligence Theory and Intelligence Cycle*) yang menempatkan intelijen sebagai komponen utama sistem keamanan nasional. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah personel di jajaran, Deninteldam XII/Tpr, yang diantaranya bertanggung jawab untuk menjalankan tiga fungsi pokok intelijen: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berbatasan langsung dengan Sarawak dan Sabah (Malaysia

Timur), di mana aktivitas lintas batas ilegal, penyelundupan, dan infiltrasi sosial-ekonomi sering terjadi. Dalam konteks tersebut, fungsi penyelidikan berperan strategis sebagai *early warning system*, yang memungkinkan satuan mendeteksi potensi ancaman sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara. Secara teoritis, fungsi penyelidikan mencerminkan tahapan pertama dalam Siklus Intelijen (Perkasad, 2004), yakni proses perolehan dan pengumpulan data yang relevan dengan potensi ancaman. Berdasarkan hasil penelitian ini (observasi, wawancara dan dokumentasi), perencanaan operasi penyelidikan oleh Deninteldam selalu diawali dengan kajian terhadap intelijen dasar, berupa data kejadian masa lalu yang digunakan sebagai dasar penentuan sasaran. Tahapan ini mencerminkan penerapan prinsip *intelligence as knowledge*, di mana informasi historis diolah menjadi dasar perumusan rencana operasi baru. Proses penentuan sasaran reguler, alternatif, dan darurat menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi operasional yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, pemilihan personel dengan kesesuaian etnis dan bahasa masyarakat perbatasan menggambarkan penerapan pendekatan intelijen kultural, yang penting dalam konteks operasi di wilayah dengan sensitivitas sosial tinggi. Strategi ini sejalan dengan pandangan Haripin (2022) bahwa efektivitas intelijen sangat bergantung pada kemampuan memahami konteks sosial dan psikologis masyarakat di area operasi.

Tahapan berikutnya, *briefing*, menjadi wujud konkret dari aspek intelijen sebagai organisasi dan kegiatan. Dalam tahap ini, Deninteldam XII/Tpr melakukan koordinasi internal yang melibatkan unsur komando dan pelaksana lapangan. Data awal, sasaran, serta instruksi operasi disampaikan secara selektif melalui mekanisme yang menjamin keamanan informasi, baik secara lisan maupun melalui sandi rahasia. Pola ini menunjukkan penerapan prinsip *information security* dalam siklus intelijen. Mekanisme briefing juga mengatur koordinasi lintas satuan dengan Satgas Pamtas, Bea Cukai, Imigrasi, dan Kepolisian, meskipun sebagian kerja sama tersebut belum sepenuhnya terlembagakan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*. Namun demikian, efektivitasnya telah terlihat dari meningkatnya kecepatan respons terhadap potensi pelanggaran lintas batas. Hal ini sejalan dengan pendekatan keamanan nasional merupakan tanggung jawab kolektif berbagai instansi. Pada tahap pelaksanaan, fungsi penyelidikan Deninteldam XII/Tpr dijalankan secara terpadu dengan fungsi pengamanan dan penggalangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, setiap operasi penyelidikan tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup upaya pengamanan terhadap personel dan jaringan informasi, serta penggalangan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan memperoleh informasi lokal yang akurat. Pendekatan ini mencerminkan konsep *intelligence as a social process*, di mana keberhasilan operasi sangat bergantung pada interaksi dan hubungan sosial antara aparat dan masyarakat. Tantangan terbesar di tahap ini adalah keterbatasan sarana mobilitas dan komunikasi, terutama di wilayah dengan topografi berat dan akses terbatas. Namun demikian, Deninteldam mampu memanfaatkan metode lapangan secara fleksibel mengombinasikan observasi langsung, pendekatan sosial, serta analisis pola aktivitas masyarakat lintas batas.

Dalam tahap *debriefing*, Deninteldam XII/Tpr melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil operasi untuk menilai efektivitas dan memperbaiki peta kerawanan. Berdasarkan hasil wawancara, *debriefing* dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaksana lapangan untuk membahas capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Beberapa temuan penting yang muncul secara konsisten meliputi: perubahan pola pelanggaran lintas batas, munculnya jaringan baru, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan alat komunikasi dan transportasi. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan SOP, peningkatan pelatihan, serta pembinaan disiplin personel. Proses ini mencerminkan fungsi *organizational learning* dalam lembaga intelijen, di mana setiap operasi menjadi sumber pembelajaran untuk

meningkatkan kesiapan operasi berikutnya. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Agus Subagyo (2021) bahwa efektivitas operasi keamanan di perbatasan sangat ditentukan oleh integrasi informasi intelijen dan sinergi antarinstansi. Deninteldam XII/Tpr telah menerapkan model integratif serupa melalui kolaborasi fungsional dengan instansi terkait, meskipun belum optimal dari sisi kelembagaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Iswahyudhi Utari Turyadi dkk. (2021) yang menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern seperti *Internet of Things (IoT)* dalam mendukung sistem deteksi dini. Keterbatasan peralatan pengawasan dan komunikasi Deninteldam menunjukkan masih perlunya modernisasi sarana intelijen agar deteksi dini dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Sementara itu, relevansi dengan penelitian Yohanes Arman dkk. (2024) menegaskan bahwa upaya pencegahan pelanggaran lintas batas tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan kolaborasi lintas sektor yang kuat dua hal yang juga menjadi tantangan bagi Deninteldam dalam konteks perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan, memperkaya, dan menyempurnakan konsep intelijen klasik, dengan menunjukkan bahwa fungsi penyelidikan tidak hanya berperan sebagai aktivitas teknis untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis yang adaptif terhadap konteks geografis dan sosial perbatasan. Deninteldam XII/Tanjungpura memainkan peran ganda sebagai pelaksana taktis di lapangan dan sebagai simpul integrasi sistem peringatan dini nasional. Melalui penerapan Siklus Intelijen secara konsisten, mulai dari persiapan hingga *briefing*, Deninteldam XII/Tpr telah membangun sistem deteksi dini yang relatif efektif dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran lintas batas, meskipun masih menghadapi kendala struktural dan teknologi. Secara keseluruhan, fungsi penyelidikan Deninteldam XII/Tanjungpura membuktikan bahwa keberhasilan sistem deteksi dini sangat bergantung pada kombinasi antara profesionalisme personel, koordinasi lintas instansi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika lapangan. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menegaskan bahwa intelijen memiliki peran utama dalam melakukan deteksi dan peringatan dini terhadap setiap potensi ancaman terhadap kepentingan nasional. Dengan memperkuat kapasitas personel, modernisasi sarana intelijen, serta kelembagaan kerja sama antarinstansi, Deninteldam XII/Tanjungpura dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan pertahanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kolaborasi Deninteldam XII/Tanjungpura dan instansi lain dalam rangka deteksi dini guna pencegahan pelanggaran lintas batas wilayah Indonesia-Malaysia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Deninteldam XII/Tanjungpura dengan Satgas Pamtas RI-Malaysia dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) membentuk sistem pengawasan perbatasan yang bersifat interdependen, adaptif, dan berbasis kepercayaan institusional. Berdasarkan data lapangan, hubungan lintas lembaga ini tidak hanya sekadar koordinasi administratif, tetapi telah berkembang menjadi jaringan kolaboratif strategis yang terarah pada penguatan sistem deteksi dini (*early warning system*). Pola kerja tersebut diwujudkan dalam empat dimensi utama, yakni *networking*, *cooperative*, *coordinating*, dan *collaboration*, yang sejalan dengan kerangka konseptual *continuum of partnership* sebagaimana dikemukakan oleh Sabarudin (2015), di mana setiap tingkat kemitraan menggambarkan peningkatan komitmen, integrasi, dan formalitas dalam hubungan antarinstansi. Dalam dimensi *networking*, Deninteldam berperan sebagai simpul utama dalam pertukaran informasi intelijen lintas lembaga. Data lapangan menunjukkan bahwa Deninteldam membangun jejaring komunikasi intensif dengan Satgas Pamtas, Polda Kalbar, Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina. Pertukaran informasi dilakukan baik secara formal melalui

rapat koordinasi dan laporan situasi, maupun secara informal melalui komunikasi lapangan dan media daring seperti radio taktis atau aplikasi pesan terenkripsi. Mekanisme ini memperkuat kesadaran situasional (*situational awareness*) aparat keamanan, yang menjadi prasyarat utama dalam mendeteksi potensi pelanggaran lintas batas sejak dini. Temuan ini mengonfirmasi konsep *intelligence as a social process* yang menegaskan, bahwa efektivitas intelijen tidak semata ditentukan oleh perangkat teknologi, melainkan oleh kualitas interaksi sosial dan jaringan kepercayaan antaraktor di lapangan. Selanjutnya, dalam dimensi *cooperative*, penelitian menemukan bahwa meskipun belum terdapat Nota Kesepahaman (MoU) formal antara Deninteldam XII/Tpr dengan Polda Kalbar, bentuk kerja sama yang berlangsung sudah berjalan efektif melalui koordinasi teknis dan dukungan operasional. Hal ini tampak dari pelaksanaan operasi gabungan seperti patroli perbatasan, *sweeping* PLBN, penanganan penyelundupan barang ilegal, dan pencegahan *trafficking* lintas negara. Kerja sama tersebut mencerminkan tahap awal dari kolaborasi strategis sebagaimana dijelaskan Hogue (2003), di mana interaksi lintas lembaga didasarkan pada kesamaan visi dan prinsip kerja kolektif tanpa harus menunggu adanya formalitas hukum yang kaku. Dengan demikian, kerja sama fungsional yang telah berjalan menunjukkan bentuk *governance in practice* atau tata kelola kolaboratif di tingkat operasional, di mana efektivitas tidak hanya diukur dari adanya dokumen legal, tetapi dari konsistensi komunikasi dan dukungan lapangan.

Pada dimensi *coordinating*, hubungan antara Deninteldam dan Satgas Pamtas memperlihatkan tingkat integrasi yang lebih tinggi dalam struktur komando dan pelaksanaan operasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letkol Inf. Zulkarnaen Galib, koordinasi operasional berada di bawah kendali Pangdam XII/Tanjungpura selaku Panglima Komando Tugas Darat Gabungan (Kogab Tugas Darat). Dalam struktur ini, Deninteldam berperan sebagai penyedia informasi intelijen strategis, sementara Satgas Pamtas melaksanakan tindakan taktis di lapangan. Polda Kalbar dan instansi sipil lain bertindak sebagai mitra koordinatif yang berperan dalam aspek hukum dan administrasi lintas batas. Pola koordinatif ini sejalan dengan pendekatan *whole-of-government approach* (Christensen & Læg Reid, 2007), yang menekankan bahwa keamanan nasional bukan tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan hasil sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam sistem pemerintahan terpadu. Dimensi *collaboration* mencerminkan tahap paling maju dari hubungan antarinstansi, ditandai oleh komitmen jangka panjang dan integrasi sistem pengawasan. Berdasarkan temuan penelitian, Deninteldam XII/Tpr bersama Polda Kalbar tengah menyusun nota kesepahaman yang menjadi dasar bagi terbentuknya pusat komando bersama dan sistem pelaporan terpadu. Bentuk kolaborasi ini mengarah pada pembagian sumber daya, baik personel intelijen, teknologi pemantauan, maupun data strategis, guna memperkuat mekanisme *early warning* terhadap ancaman lintas batas. Implementasi pendekatan ini sejalan dengan teori *Collaboration Theory* (Springer, 2023), yang menekankan bahwa kolaborasi merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagi sumber daya, tanggung jawab, dan risiko secara seimbang di antara para pihak untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara independen. Dalam konteks Deninteldam XII/Tpr, kolaborasi ini bukan hanya kebutuhan operasional, melainkan strategi pertahanan adaptif dalam menghadapi ancaman transnasional yang semakin kompleks.

Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat temuan studi sebelumnya oleh Sutisna & Rofii (2022) yang menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci efektivitas intelijen strategis dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Namun, penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan aspek *human-centric intelligence* dan *trust-based collaboration* sebagai faktor penentu keberhasilan sistem deteksi dini di perbatasan darat. Sementara itu, temuan ini juga melengkapi penelitian Agus Subagyo (2021) yang menyoroti

lemahnya integrasi intelijen dalam Satgas Pamtas. Dalam konteks Deninteldam XII/Tpr, kelemahan tersebut mulai teratasi melalui penguatan jejaring kerja dan peningkatan kapasitas kolaboratif antarlembaga. Secara konseptual, kolaborasi yang dibangun Deninteldam XII/Tpr menggambarkan bentuk sinergi yang menuju pada model *collaborative security governance*, di mana peran militer, kepolisian, dan instansi sipil berbaur dalam sistem pengawasan kolektif. Hal ini juga mencerminkan transformasi fungsi intelijen dari sekadar penyedia informasi menjadi agen integratif yang memediasi kerja sama lintas institusi. Dengan demikian, keberhasilan sistem deteksi dini di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat atau jumlah personel, tetapi oleh kualitas hubungan kolaboratif yang terbangun antara Deninteldam XII/Tpr dan mitra strategisnya. Pada akhirnya, hasil interpretasi terhadap data empirik dan teori menunjukkan bahwa kolaborasi Deninteldam XII/Tanjungpura dengan instansi lain berfungsi sebagai pondasi utama sistem deteksi dini yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran lintas batas, memperkuat stabilitas keamanan kawasan, serta menjadi model penerapan teori kolaborasi dalam praktik pertahanan negara di wilayah perbatasan.

Strategi Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam rangka deteksi dini guna pencegahan pelanggaran lintas batas wilayah Indonesia-Malaysia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan dalam mendukung deteksi dini dan pencegahan pelanggaran lintas batas Indonesia-Malaysia dijalankan melalui pendekatan sistematis yang memadukan unsur tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*) sebagaimana kerangka strategi militer menurut Arthur F. Lykke (1989). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Deninteldam tidak hanya mengandalkan kemampuan taktis, tetapi juga mengembangkan sistem penyelidikan yang terencana dan terintegrasi guna memperkuat *early warning system* (sistem peringatan dini) di wilayah perbatasan. Dari sisi Sarana (*Means*), Deninteldam XII/Tanjungpura mengorganisasikan dan mengoptimalkan sumber daya intelijen yang tersedia secara terencana dan berlapis untuk mendukung pelaksanaan penyelidikan. Hal ini terlihat dari pengelolaan personel berbasis kompetensi, pemanfaatan perlengkapan pengamatan, serta sistem komunikasi dan dukungan logistik yang adaptif terhadap kondisi geografis yang sulit. Strategi ini mencerminkan prinsip efisiensi sumber daya militer sebagaimana ditegaskan oleh Lykke (1989), bahwa ketersediaan dan pengelolaan sarana menentukan efektivitas pencapaian tujuan strategis.

Keterbatasan infrastruktur dan logistik di wilayah perbatasan tidak menghambat pelaksanaan fungsi penyelidikan karena Deninteldam menerapkan inovasi lokal dengan melibatkan masyarakat perbatasan sebagai sumber informasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community intelligence* (Wahyurudhanto, 2018), di mana peran masyarakat menjadi elemen pendukung bagi sistem deteksi dini. Dalam konteks Teori Deteksi Dini (Haripin, 2022), langkah ini menggambarkan fungsi dasar intelijen dalam mengelola risiko strategis melalui optimalisasi sumber daya manusia dan informasi di lapangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Agus Subagyo (2021) yang menyoroti pentingnya peran sosial dan kemitraan lokal dalam pengamanan wilayah perbatasan. Namun, penelitian ini memberikan penyempurnaan dengan menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik aparat (seperti Satgas Pamtas), melainkan juga oleh kemampuan Deninteldam dalam mengelola sistem informasi intelijen secara berlapis sebagai instrumen pencegahan. Dalam aspek Cara (*Ways*) atau metode strategis, Deninteldam XII/Tanjungpura menerapkan kombinasi pendekatan taktis dan intelijen strategis. Beberapa metode yang digunakan mencakup

penyelidikan lapangan (*ground observation*), pendekatan komunitas intelijen, pemanfaatan teknologi pemantauan, koordinasi lintas instansi, serta analisis situasi berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan *Early Warning Theory* (Sumarjiyo, 2018; Yudhana, 2009) yang menekankan pentingnya kemampuan penginderaan awal (*foreknowledge*) untuk mencegah pendadakan dan memberikan waktu bagi pengambil kebijakan dalam merespons ancaman.

Konsep *forward defense* yang diterapkan oleh Deninteldam, dengan menempatkan unsur penyelidik di titik-titik terdepan, menunjukkan penerapan strategi pertahanan aktif yang sejalan dengan pandangan Clausewitz (1984) bahwa strategi militer harus bersifat proaktif dalam membentuk situasi yang menguntungkan. Penempatan unsur penyelidik di wilayah non-resmi perlintasan menunjukkan bahwa fungsi intelijen bukan hanya sebagai “mata dan telinga” komando, tetapi juga sebagai “perisai pertama” dalam mengantisipasi ancaman lintas batas. Strategi ini semakin relevan dalam konteks ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, infiltrasi, dan kejahatan transnasional. Dari perspektif teori strategi militer, penerapan metode ini menggambarkan hubungan sinergis antara *ways* dan *means*, di mana metode penyelidikan lapangan dan analisis situasi hanya dapat berjalan efektif apabila didukung sarana dan personel yang memadai. Hal ini sesuai dengan prinsip Lykke bahwa ketidakseimbangan antara *means-ways-ends* dapat menimbulkan risiko kegagalan strategi. Jika dibandingkan dengan penelitian Sutisna dan Rofii (2022) yang menekankan kolaborasi intelijen maritim antarinstansi, penelitian ini memperluas cakupan dengan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif juga efektif diterapkan di wilayah darat melalui koordinasi lintas satuan seperti Satgas Pamtas, Kodim, dan Polda Kalbar. Dengan demikian, strategi penyelidikan Deninteldam mencerminkan penerapan *whole-of-government approach* dalam skala operasional militer.

Berikutnya, tujuan strategis (*ends*) dari pelaksanaan fungsi penyelidikan Deninteldam XII/Tanjungpura adalah mewujudkan sistem deteksi dini yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Misi ini selaras dengan tujuan pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menegaskan bahwa intelijen negara berperan melakukan upaya deteksi dan peringatan dini terhadap setiap bentuk ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam kerangka *Early Warning Theory*, tujuan ini merupakan manifestasi dari fungsi fundamental intelijen: mengidentifikasi potensi ancaman, mencegah pendadakan, membantu pengambilan keputusan, dan mendukung manajemen krisis (Sumarjiyo, 2018). Dengan demikian, strategi penyelidikan Deninteldam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis menjadi fondasi bagi proses pengambilan keputusan pertahanan di tingkat komando daerah maupun nasional. Secara jangka panjang, Deninteldam XII/Tanjungpura berupaya membangun sistem deteksi dini terpadu (*integrated early warning system*) yang melibatkan kolaborasi lintas satuan dan instansi. Orientasi ini sejalan dengan rekomendasi penelitian Gunawan et al. (2024) yang menyoroti perlunya revitalisasi studi dan praktik keamanan perbatasan berbasis intelijen kolaboratif. Melalui sistem ini, Deninteldam tidak hanya menjaga keamanan fisik wilayah, tetapi juga mendukung stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di daerah perbatasan. Dengan demikian, fungsi penyelidikan menjadi bagian integral dari *comprehensive security* atau keamanan menyeluruh, yang melampaui aspek militer semata.

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi di atas, dapat diverifikasi bahwa strategi penyelidikan Deninteldam XII/Tanjungpura secara empiris mengonfirmasi dan menyempurnakan kedua teori utama yang digunakan: *Pertama*, Teori Deteksi Dini (*Early Warning Theory*) dikonfirmasi melalui penerapan sistem pengumpulan dan analisis informasi lapangan secara cepat dan akurat untuk memberikan *foreknowledge* kepada pimpinan. Penelitian ini memperkuat gagasan Haripin (2022) bahwa intelijen merupakan komponen

integral sistem keamanan nasional. Kedua, Teori Strategi Militer (Lykke, Clausewitz, dan Hart) disempurnakan melalui penerapan konsepsi *means-ways-ends* dalam konteks operasional intelijen. Strategi Deninteldam menunjukkan bahwa fungsi penyelidikan merupakan elemen strategis dalam mendukung *early warning system* di medan yang kompleks seperti perbatasan Indonesia-Malaysia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang strategi intelijen dalam konteks pertahanan teritorial. Strategi penyelidikan Deninteldam XII/Tanjungpura membuktikan bahwa keberhasilan sistem deteksi dini tidak hanya bergantung pada keunggulan teknologi, tetapi pada kemampuan institusi dalam mengintegrasikan sumber daya, membangun kepercayaan lintas satuan, dan memanfaatkan informasi lokal secara sistematis. Dengan demikian, strategi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk strategi militer adaptif berbasis intelijen preventif, yang selaras dengan kebijakan pertahanan nasional dan prinsip keamanan kolektif. Melalui proses interpretasi teoretis dan verifikasi empiris, dapat diketahui bahwa strategi Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan berperan vital dalam deteksi dini dan pencegahan pelanggaran lintas batas Indonesia-Malaysia. Strategi ini dijalankan melalui pengelolaan sumber daya intelijen yang efektif (*means*), penerapan metode penyelidikan dan koordinasi lintas instansi (*ways*), serta tujuan jangka panjang berupa terwujudnya sistem peringatan dini terpadu (*ends*). Pendekatan ini membuktikan bahwa Deninteldam telah berhasil mengoperasionalkan teori deteksi dini dan strategi militer dalam konteks nyata, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pertahanan dan ketahanan nasional di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Peran Deninteldam XII/Tanjungpura melalui fungsi penyelidikan memiliki kedudukan strategis dalam sistem keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi penyelidikan Deninteldam tidak hanya mencerminkan penerapan *Siklus Intelijen* secara utuh, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan sosial, budaya, dan geografis yang khas wilayah perbatasan. Fungsi penyelidikan dijalankan secara berlapis melalui tahap perencanaan, briefing, pelaksanaan, dan *debriefing*, yang seluruhnya berorientasi pada upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman lintas batas. Dengan profesionalisme personel dan kemampuan adaptasi operasional, Deninteldam berhasil membangun sistem peringatan dini yang relatif efektif, meskipun masih menghadapi kendala sarana dan koordinasi antarinstansi. Kolaborasi antara Deninteldam XII/Tanjungpura dengan instansi lain seperti Satgas Pamtas, Polda Kalbar, Imigrasi, dan Bea Cukai telah membentuk model kerja sama keamanan yang interdependen dan berbasis kepercayaan institusional. Kolaborasi ini berkembang melalui tahapan *networking*, *cooperation*, *coordination*, hingga *collaboration* yang mencerminkan penerapan teori kolaborasi dalam praktik pertahanan negara. Deninteldam berperan sebagai simpul utama pertukaran informasi intelijen yang mendukung peningkatan kesadaran situasional di lapangan. Meskipun belum seluruhnya terlembagakan secara formal melalui *MoU*, kolaborasi fungsional ini telah meningkatkan efektivitas deteksi dini dan mempercepat respons terhadap potensi pelanggaran lintas batas, sehingga mewujudkan tata kelola keamanan perbatasan yang sinergis dan adaptif. Dari aspek strategi, Deninteldam XII/Tanjungpura menerapkan pendekatan komprehensif berdasarkan konsep *means-ways-ends* dalam kerangka teori strategi militer. Pengelolaan sumber daya intelijen (*means*), penerapan metode penyelidikan dan koordinasi lintas satuan (*ways*), serta pencapaian tujuan sistem deteksi dini terpadu (*ends*) menjadi satu kesatuan yang membentuk strategi pertahanan adaptif berbasis intelijen preventif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem deteksi dini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh integrasi sumber daya manusia,

jaringan sosial, dan kemitraan antarinstansi. Dengan demikian, strategi penyelidikan Deninteldam XII/Tanjungpura terbukti menjadi instrumen vital dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memperkuat ketahanan nasional melalui mekanisme deteksi dini dan pencegahan pelanggaran lintas batas yang efektif dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, BIN, dan Mabes TNI perlu memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran bagi modernisasi sarana intelijen Deninteldam. Prioritas diarahkan pada teknologi pemantauan, komunikasi terenkripsi, dan pembangunan training center intelijen berbasis perbatasan. Selain itu, penguatan kebijakan kolaboratif lintas kementerian penting untuk mewujudkan border security governance yang terpadu. Pemerintah daerah, Polda Kalbar, Imigrasi, Bea Cukai, dan instansi sipil perlu meningkatkan sinergi formal dengan Deninteldam XII/Tanjungpura. Pembentukan MoU dan Joint Command Center di wilayah perbatasan akan memperjelas pembagian peran serta mempercepat integrasi informasi. Pendekatan kolaboratif ini memastikan deteksi dini berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas personel, modernisasi sarana komunikasi, dan pembaruan sistem data intelijen berbasis TI menjadi kebutuhan utama. Pengembangan Integrated Intelligence Information System akan mempercepat proses analisis dan peringatan dini. Optimalisasi debriefing serta penguatan tata kelola keamanan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas operasi dan menjaga kerahasiaan data. Masyarakat perbatasan diharapkan terus mendukung fungsi penyelidikan melalui komunikasi dan kepercayaan yang baik dengan aparat. Pendidikan bela negara dan pelatihan kewaspadaan dini perlu ditingkatkan untuk memperkuat kesadaran keamanan. Sinergi ini akan memperkuat pendekatan community intelligence dalam mendeteksi potensi pelanggaran lintas batas. Penelitian lanjutan dapat mengkaji pemanfaatan teknologi deteksi dini berbasis IoT, sistem pengawasan digital, dan pertahanan siber. Studi komparatif antarwilayah perbatasan juga penting untuk memperkaya analisis kebijakan. Pendekatan multidisipliner akan mendukung pengembangan model keamanan adaptif menghadapi ancaman global dan non-tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, M., Baez, A., & Rutland, P. (2021). *National security in the digital and post-pandemic era*. Routledge.
- Bagus, I., et al. (2019). Intelligence as an early warning system in national security framework. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 45–60.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. Wiley.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- Clausewitz, C. von. (1984). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Conboy, K. (2015). *Intel: Inside Indonesia's intelligence service*. Equinox Publishing.
- Ćurčić, S. (2021). National security as a dynamic and multidimensional concept. *Security Dialogues*, 12(1), 15–29.
- Gray, C. S. (2015). *The strategy bridge: Theory for practice*. Oxford University Press.
- Gunawan, A., et al. (2024). Revitalizing border security studies through collaborative intelligence framework. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 1–15.
- Haripin, M. (2022). *Intelijen dan keamanan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hart, B. H. L. (1929). *The decisive wars of history*. Bell.

- Heywood, I., Cornelius, S., & Carver, S. (2011). *An introduction to geographical information systems* (4th ed.). Pearson.
- Hogue, T. (2003). *Building collaboration: A guide for community-based organizations*. Community Development Institute.
- Kraak, M.-J., & Ormeling, F. (2020). *Cartography: Visualization of geospatial data* (4th ed.). CRC Press.
- Lemhannas RI. (2023). *Konsepsi ketahanan nasional*. Perpustakaan Lemhannas RI.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2010). *Geographic information systems and science* (3rd ed.). Wiley.
- Lykke, A. F. (1989). Defining military strategy: Ends, ways, means. *Military Review*, 69(5), 2–8.
- Manullang, A. C. (2013). *Sistem intelijen negara*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- McEntire, D. A. (2021). Military roles in disaster response and non-traditional security threats. *Journal of Emergency Management*, 19(3), 145–158.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management*. Free Press.
- Perkasad. (2004). *Doktrin intelijen TNI AD*. Markas Besar TNI AD.
- Sabarudin. (2015). *Kolaborasi dalam administrasi publik*. Graha Ilmu.
- Sarjito, A. (2024). Siklus intelijen dalam perspektif keamanan nasional. *Jurnal Intelijen Indonesia*, 5(1), 22–35.
- Sarlito, W. S. (2013). *Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial*. Salemba Humanika.
- Seskoad. (2022). *Doktrin intelijen teritorial TNI AD*. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.
- Springer, S. (2023). Collaboration theory in contemporary governance. *Journal of Public Administration Studies*, 18(2), 101–115.
- Subagyo, A. (2021). Integrasi intelijen dalam operasi pengamanan perbatasan. *Jurnal Keamanan dan Strategi Pertahanan*, 7(2), 77–92.
- Sumarjiyo. (2018). Early warning system dalam sistem intelijen negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 4(1), 33–48.
- Sutisna, I., & Rofii, A. (2022). Kolaborasi intelijen maritim dalam menghadapi ancaman non-militer. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 8(1), 55–70.
- Thomas, T. (2025). *Strategic theory and military application*. Defense Studies Press.
- Trifunović, D., & Ćurčić, S. (2021). Realist perspectives on national security policy. *Security Studies Review*, 14(2), 89–104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahyurudhanto. (2018). Community intelligence dan deteksi dini dalam keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 61–74.
- Yudhana, A. (2009). Deteksi dini dalam sistem pengamanan wilayah. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 3(2), 101–112.